
PERAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA DALAM MENINGKATKAN PELUANG MASYARAKAT MEMASUKI DUNIA USAHA & DUNIA INDUSTRI

Yeni Nuraeni¹

¹Puslitbang Kementerian Ketenagakerjaan RI

Email :
yeninur@hotmail.com

Abstrak

Kondisi angkatan kerja Indonesia masih lemah dari segi kualitas, sehingga pemerintah perlu mendorong peran dari lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS) dalam mengupayakan peningkatan kompetensi tenaga kerja Indonesia. Salah satu bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia adalah memberikan bantuan berupa program pelatihan dan bantuan peralatan pelatihan kerja kepada LPKS. Tujuan pemberian bantuan adalah dalam rangka mendorong masyarakat untuk dapat memasuki Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). LPKS mengajukan proposal untuk mendapatkan bantuan, setelah melalui proses seleksi, LPKS yang berhasil memperoleh bantuan yang berupa program pelatihan atau peralatan, wajib untuk melaksanakan pelatihan kepada masyarakat yang dianggap belum mampu untuk mengikuti pelatihan kerja dengan biaya sendiri. Salah satu jenis bantuan program pelatihan dan peralatan pelatihan kerja yang banyak diberikan adalah dibidang keahlian menjahit. Kesempatan Kerja dan Usaha di bidang keahlian menjahit di beberapa daerah misalnya di daerah Bandung dan Semarang terbuka lebar dengan tumbuhnya usaha konveksi dan perusahaan garment. Bantuan yang diberikan kepada LPKS yang memiliki jaringan luas dengan pengguna lulusan, memberikan dampak yang signifikan dalam memberikan peluang bagi masyarakat untuk memasuki DUDI. Kunci keberhasilan LPKS dalam menciptakan kesempatan kerja dan berwirausaha kepada lulusannya adalah melalui mekanisme kerjasama dengan perusahaan pengguna dan bimbingan kewirausahaan yang bersifat kekeluargaan. Hal-hal yang perlu diperbaiki dalam mekanisme pemberian Bantuan Program Pelatihan dan Peralatan Pelatihan Kerja oleh pemerintah adalah dari segi waktu pelatihan yang relative singkat, bantuan program pelatihan belum disertai Uji kompetensi serta mekanisme seleksi LPKS yang dinilai masih kurang objective dan transparan.

Kata Kunci: Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, Dunia Usaha dan Dunia Industri, Bantuan Program Pelatihan, Bantuan Program Peralatan Pelatihan Kerja

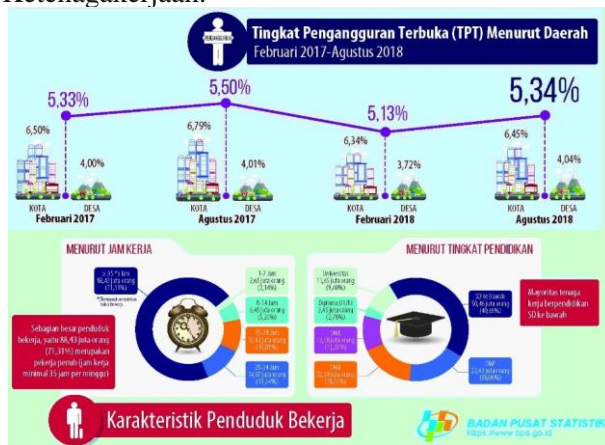
PENDAHULUAN

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa jumlah angkatan kerja pada Agustus 2018 mencapai sebanyak 131,01 juta orang, naik 2,95 juta orang dibandingkan dengan Agustus 2017. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) juga meningkat 0,59%. Dalam setahun terakhir pengangguran berkurang 40.000 orang, sejalan dengan TPT yang turun menjadi 5,34% pada Agustus 2018. Walaupun tingkat pengangguran terjadi penurunan, tetapi masih tinggi. Dilihat dari tingkat pendidikan pada Agustus 2018, TPT untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih mendominasi di antara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 11,24%. TPT tertinggi berikutnya terdapat pada Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 7,95%. Hal ini artinya, ada penawaran tenaga kerja yang tidak terserap oleh tingkat pendidikan SMK dan SMA. Sedangkan, mereka yang berpendidikan rendah cenderung mau menerima pekerjaan apa saja, misalnya TPT Sekolah Dasar (SD) sebesar 2,43%. Berdasarkan data pendidikan yang ditamatkan, maka jumlah angkatan kerja Indonesia masih didominasi oleh lulusan SMA ke bawah dan ini menjadi masalah yang harus dihadapi oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

satu) unit, terdiri atas 17 (tujuh belas) BLK UPTP dan 284 BLK UPTD (Provinsi/Kabupaten/Kota). Dari jumlah BLK milik pemerintah tersebut belum cukup kapasitasnya dalam mengakomodasi kebutuhan pelatihan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan terbatasnya peralatan, mesin serta instruktur dan tenaga pelatihan yang tersedia di sejumlah BLK tersebut.

Untuk mencapai target rencana kerja Kementerian Ketenagakerjaan khususnya yang terkait dengan Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, yaitu menyiapkan tenaga kerja yang kompeten sebanyak satu juta orang, dengan keterbatasan kapasitas BLK maka perlu dilakukan menyelenggarakan pelatihan kerja berbasis kompetensi oleh Lembaga Pelatihan milik pemerintah maupun swasta. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta/LPKS perlu mendapat perhatian khusus agar dapat menghasilkan mutu lulusan yang profesional dan kredibel. Untuk dapat menjamin mutu lulusannya LPKS harus memiliki sarana dan prasarana pelatihan kerja yang memadai, program pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri, instruktur dan tenaga pengelola pelatihan kerja yang kompeten serta memiliki jejaring dengan dunia industri.

Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan berupaya untuk memberdayakan LPKS untuk dapat meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan dengan memberikan bantuan Program Pelatihan dan bantuan Peralatan Peralatan pelatihan Kerja kepada LPKS sehingga dapat memenuhi standar BLK Pemerintah. Pemberian bantuan ini dilakukan dalam rangka memberikan kesempatan bagi LPKS untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja sehingga menghasilkan lulusan yang dapat bersaing di pasar kerja global sekaligus mampu untuk mengurangi pengangguran.



Gambar 1. Tingkat Pengangguran Terbuka
Sumber : (BPS, 2018)

Kondisi ideal yang diharapkan dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompeten adalah menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi di Balai Latihan Kerja (BLK) yang tersebar di seluruh Indonesia dengan jumlah sekitar 301 (tiga ratus

METODE

Program pelatihan LPKS merupakan program layanan pelatihan berbasis kompetensi yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang

ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja. Melalui kegiatan pelatihan tersebut, para peserta dipastikan memiliki kompetensi di bidang tertentu (sesuai dengan kejuruan/program yang diikuti), sehingga mampu mengisi peluang kerja yang dibutuhkan di dunia kerja (industri/wirausaha).

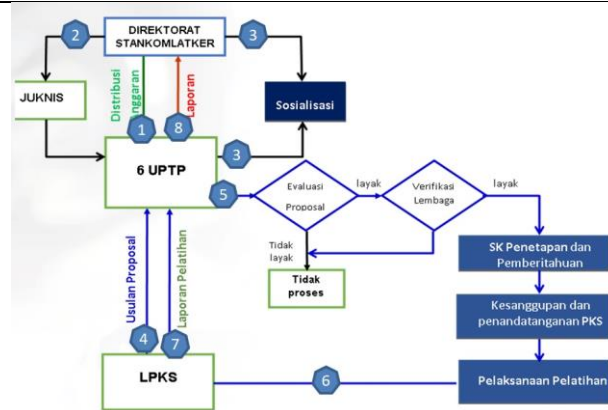
Tujuan pemberian bantuan program pelatihan dan peralatan pelatihan kerja kepada LPKS adalah sebagai berikut ; 1) Memberikan bekal kompetensi bagi calon tenaga kerja sehingga mampu mengisi peluang kerja dan usaha, 2)Mendorong LPKS untuk turut berpartisipasi dalam rangka peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan kerja, 3) Memperluas akses dan mutu pelatihan kerja bagi masyarakat untuk dapat mengikuti pelatihan berbasis kompetensi di LPKS.

Jenis Bantuan Program Pelatihan yang diberikan kepada LPKS meliputi bantuan keuangan sebesar Rp.30.000.000 untuk melaksanakan pelatihan kepada 20 orang peserta selama 100 jp dalam waktu 13 hari . Adapun mekanisme pemberian bantuan dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Mekanisme Pemberian Bantuan Program Pelatihan. Sumber : (Dir. Stankomlatker, 2018)

Adapun mekanisme koordinasi antara LPKS dengan Lembaga Pemerintah yang menyalurkan bantuan bias dilihat pada gambar 3.



Gambar 3. Mekanisme Koordinasi Bantuan Program Pelatihan. Sumber : (Dir. Stankomlatker, 2018)

Untuk melaksanakan pelatihan kerja LPKS harus memiliki sarana dan prasarana pelatihan kerja yang memadai sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga LPKS dapat menjamin mutu lulusan pelatihan kerja yang kompeten dalam bidangnya dan dapat diserap oleh dunia industri. Salah satu bentuk kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan yaitu dengan memberikan bantuan peralatan pelatihan kerja bagi LPKS. Pemberian bantuan ini dilakukan dengan berbagai tahapan dan mekanisme seperti terlihat pada gambar 4.



Gambar 4. Mekanisme dan Koordinasi Pemberian Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja. Sumber : (Dir. Stankomlatker, 2018)

Untuk bantuan peralatan pelatihan kerja bidang kejuruan menjahit ada 2 jenis paket alat yang diberikan yaitu itu kejuruan tata busana dan untuk garment. Jenis-jenis peralatan kedua kejuruan di bidang menjahit dapat dilihat pada gambar 5.

Kejuruan Menjahit Tata Busana
 ✦ Mesin Jahit Portable 14 (empat belas) Jahitan + Meja;
 ✦ Mesin Jahit Portable 27 (dua puluh tujuh) Jahitan + Meja;
 ✦ Mesin Obras;
 ✦ Mesin Neci; dan
 ✦ Mesin Bordir.

Kejuruan Menjahit Garmen
 ✦ Mesin Jahit High Speed (jarum 1 otomatis);
 ✦ Mesin Jahit High Speed (jarum 2);
 ✦ Mesin Obras; dan
 ✦ Mesin Kamput (overdeck).

Gambar 5. Jenis Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja Bidang Kejuruan Menjahit
 Sumber : (Dir. Stankomlatker, 2018)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Manfaat dan Dampak yang telah dirasakan dari pemberian Bantuan Program Pelatihan dan Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja Bidang Kejuruan Menjahit

Masyarakat menengah ke bawah sangat terbantu dengan adanya bantuan program pelatihan. LPKS penerima bantuan program pelatihan menjahit di Serang dan Kota Semarang dan sekitarnya dapat memfasilitasi lulusannya untuk mendapatkan pekerjaan, karena dilingkungan sekitarnya banyak konveksi dan industri garment. sehingga lulusan pelatihan langsung bisa disalurkan untuk bekerja di konveksi atau di industri garment.

Sebagian perusahaan konveksi memberi fasilitas bantuan mesin pada masyarakat berupa mesin jahit sebanyak 10 – 20 unit sehingga bisa mengerjakan di rumah. Adapun LPKS yang berada di sekitar industri garment dapat menyalurkan lulusannya dengan mudah ke industri bahkan industri garment sudah memesan lulusan sebelum selesai pelaksanaan pelatihan.



Gambar 6. Salah Satu LPKS di Kota Serang Menyalurkan Lulusan Ke Perusahaan Konveksi

2. Kecukupan Anggaran Untuk Bantuan Program Pelatihan dan Lamanya Pelatihan

Untuk pelatihan penjahit baik itu bidang tata busana maupun garment dengan waktu pelatihan selama 100 jp kurang memadai untuk menghasilkan lulusan yang siap masuk ke DUDI. Dari segi jumlah anggaran yang diberikan hanya Rp. 30.000.00 untuk LPKS yang benar-benar melakukan pelatihan kerja belum memadai dimana LPKS pada umumnya harus mengeluarkan biaya tambahan untuk proses pelatihan selama 13 hari untuk 20 peserta pelatihan.

Dengan anggaran dan waktu yang terbatas sulit bagi lembaga untuk mencapai kompetensi lulusan yang diharapkan siap masuk ke DUDI, para lulusan biasanya harus memperdalam atau ikut magang terlebih dahulu. Untuk mengikuti uji kompetensi di bidang kejuruan menjahit minimal harus mencapai level 2 yang biasanya harus menempuh pelatihan selama 250 JP.



Gambar 6. Peserta Pelatihan Bantuan Program Pelatihan dan Peralatan Pelatihan Kerja

3. Kualitas dan Kuantitas Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja Bidang Kejuruan Menjahit

Peralatan yang diberikan kepada LPKS baik itu untuk bidang Menjahit Tata Busana maupun Garment memiliki kualitas yang bagus dan sesuai dengan kebutuhan DUDI. Dengan menggunakan peralatan yang berasal dari pemberian bantuan dapat meningkatkan motivasi peserta pelatihan. Bantuan mesin jahit yang moderen sangat bermanfaat membantu lulusan pelatihan untuk terbiasa ketika mereka akan mengikuti test bekerja

di garment. Pada umumnya sebelum mendapatkan bantuan peralatan pelatihan kerja, kondisi peralatan menjahit yang dimiliki lembaga masih sederhana belum setingkat dengan yang digunakan oleh industri garment maupun konveksi.

Kesulitan terjadi bila terjadi masalah yang cukup serius pada mesin jahit yang moderen bila lokasi LPKS jauh dari tempat service resmi, karena sulit untuk bisa dilakukan perbaikan tanpa menggunakan teknisi yang benar-benar memahami karakteristik mesin.



Gambar 7. Bantuan Peralatan Berupa Mensin Jahit Portable Untuk Kejuruan Menjahit Tata Busana



Gambar 8. Bantuan Peralatan Berupa Mensin Jahit High Speed Untuk Kejuruan Menjahit Garment

4. Upaya yang Dilakukan LPKS dalam Membangunan Jaringan Dengan Pengguna Lulusan

Di Kota Serang dan sekitarnya tidak ada industri garment tetapi banyak berkembang usaha konveksi. Pada umumnya perusahaan konveksi memiliki target produksi, dan melakukan kerja sama dengan LPKS maupun dengan masyarakat untuk mencapai target produksi dengan sistem pekerjaan menjahit bisa

dikerjakan di rumah. Untuk dapat tetap dilakukan pengawasan sehingga target produksi tetap tercapai.

Di Kota Serang dan sekitarnya banyak juga LPKS yang membuka usaha konveksi. Pemilik lembaga bisa mengajak lulusan untuk menerima order dari LPKS, sehingga dapat dapat mencapai targe produksi dan mereka lulusan mendapat penghasilan. LPKS dapat juga merekrut pekerja untuk dapat menerima orderan dari perusahaan konveksi. Lulusan diberikan fasilitas untuk bisa menyicil mesin jahit sebagai modal usaha dan bisa menerima order di rumah.

Perusahaan konveksi pada umumnya memberikan kredit mesin jahit untuk peserta pelatihan sehingga bisa mengembangkan usaha dan bekerja pada konveksi. Perusahaan konveksi memberi modal mesin jahit misalnya sebanyak 20 unit untuk bisa merekrut pegawai, mereka bisa mengerjakan orderan perusahaan di rumah. Ada sistem pengawasan dari perusahaan untuk dapat mencapai target.

Berbeda dengan Kota Serang dan sekitarnya, di Kota Semarang dan sekitarnya banyak berdiri industri garment. Industri garment memerlukan banyak pekerja sehingga mereka melakukan kerjasama dengan LPKS untuk menrekrut lulusan pelatihan. Lulusan LPKS di bidang Menjahit garment dengan mudah dapat memasuki lapangan kerja di perusahaan garment, bahkan mereka pada umunya bisa memilih industri yang memberikan fasilitas terbaik.

Bila lulusan belum cukup kompeten untuk memasuki industri garment, pada umumnya pihak industri sudah menyiapkan pelatihan lanjutan, sehingga para alumni LPKS dapat dipersiapkan kembali untuk langsung bisa bekerja diindustri garmnet.

5. Upaya yang Dilakukan LPKS Untuk Mengetahui Kondisi Lulusan Pelatihan

Tidak seperti sistem yang berlaku pada pendidikan formal, sistem pelatihan yang dilakukan oleh LPKS pada umumnya lebih bersifat kekeluargaan. Setelah selesai program pelatihan, hubungan antara lembaga dengan alumni pelatihan tidak terputus begitu saja, tetapi masih tetap berjalan dengan baik.

Ada berbagai strategi LPKS untuk tetap dapat menjalin hubungan dengan lulusan sehingga dapat terus memantau kondisi lulusannya, diantaranya ; kegiatan arisan, membuat group wa untuk setiap angkatan, menjalin kerjasama bisnis, menyebarkan info lowongan pekerjaan maupun kesempatan untuk mengikuti pelatihan khususnya yang berasal dari bantuan pemerintah.

Lulusan pelatihan masih bisa berkonsultasi dengan pemilik PLKS maupun dengan instruktur berkaitan dengan keterampilan teknis maupun peluang untuk memasuki DUDI. Siswa bisa banyak bertanya ketika praktek dilapangan masih bisa meminta bimbingan dan lnsung ke instruktur maupun pemilik lembaga.

6. Kurikulum Pelatihan & Uji Kompetensi untuk memenuhi kebutuhan memasuki DUDI

Sertifikasi kompetensi tidak terlalu diperhatikan oleh perusahaan konveksi dan industri garment, yang lebih dipentingkan keterampilan yang dimiliki. Sertifikasi hanya pengakuan yang penting kompeten. Lulusan pelatihan yang telah memiliki sertifikasi uji kompetensi, perusahaan akan melakukan test ulang. LPKS melakukan pelatihan kerja berdasarkan kebutuhan perusahaan, kalau tidak dilakukan penyesuaian terhadap kompetensi lulusan, maka akan hilang kesempatan LPKS untuk menyalurkan lulusannya.

Uji kompetensi untuk kejuruan menjahit ada yang dari LSP (dibawah Kemendikbud) ada yang dari LSK (di bawah Kemenaker). Bantuan program pelatihan dari Kemnaker tidak disertai

biaya untuk uji kompetensi sedangkan program bantuan dari Kemendikbud disertai dengan biaya uji kompetensi dari LSP. Kedua lembaga sertifikasi ini memiliki standar yang berbeda.

Modul yang dimiliki LPKS tidak memadai harus dilengkapi dan distandarisasi, setiap level pelatihannya dan selalu update. Modul pelatihan biasanya tersedia di UPTD. Kurikulum yang rancang oleh LPKS pada umumnya tidak seluruhnya dijalankan secara kaku tapi disesuaikan dengan kebutuhan pengguna lulusan. Dalam pelaksanaan pelatihan dari program bantuan karena waktunya sangat terbatas (13 hari), maka dilihat materi apa saja yang perlu disampai duluan untuk memiliki kompetensi yang memadai. Untuk metode pelatihan menjahit dengan menggunakan bantuan peralatan dari Kemnaker, siswa perlu melakukan penyesuaian misalnya dari segi kecepatan, ada system yang berbeda dengan menggunakan mesin manual.

7. Proses Sosialisasi Program Bantuan untuk Dapat Menjangkau LPKS Secara Luas

Sosialisasi bantuan program pelatihan dan peralatan pelatihan kerja waktunya terlalu singkat sehingga tidak dapat menjangkau LPKS secara luas. Pengumuman juknis terlalu cepat hanya orang-orang tertentu yang mengetahui. Dengan waktu yang sangat singkat, hanya LPKS yang telah paham betul membuat proposal yang bisa mengusulkan karena hanya diberikan waktu selama 1 bulan dari proses sosialisasi sampai pengumpulan akhir proposal. Dari sisi keadilan dinilai belum tercapai, bagi LPKS pemula sulit untuk mengejar waktu yang tersedia yaitu 1 bulan. Untuk bantuan peralatan akses harus online kalau LPKS tidak punya operator akan ketinggalan, karena waktunya yang sangat singkat.

8. Objektivitas proses Seleksi Lembaga Penerima Bantuan Program Pelatihan dan Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja

Dalam seleksi penerima bantuan belum dilihat dari aspek akreditasi LPKS. Panitia pusat dinilai tidak selektif memilih yang benar-benar berhak untuk mendapatkan bantuan. Hal ini menyebabkan motivasi LPKS untuk mengajukan akreditasi berkurang karena tidak berdampak mempertinggi kesempatan untuk memperoleh bantuan. Masih banyak LPKS yang tidak terakreditasi mendapat bantuan.

Dari segi persebaran LPKS penerima bantuan dinilai masih belum merata. Misalnya LPKS di Kabupaten Lebak banyak yang menerima bantuan dibandingkan dengan di Kabupaten Paneglang. Kabupaten Lebak ada 11 LPKS yang menerima bantuan peralatan 11 sedangkan Paneglang hanya 2 LPKS.

Diusulkan untuk melibatkan komite akreditasi dalam memberikan pertimbangan pemberian bantuan sehingga tepat sasaran. Komite akreditasi dapat memberikan rekomendasi untuk peringkat mutu LPKS yang mengajukan proposal.

KESIMPULAN

Pemberian bantuan program pelatihan dan peralatan pelatihan kerja bidang kejuruan menjahit di Kota Serang dan Kota Semarang dapat membantu meningkatkan kompetensi masyarakat untuk memasuki DUDI dengan bantuan LPKS yang telah memiliki jaringan dengan usaha konveksi dan usaha garment.

Efektifitas pemberian bantuan program pelatihan dan peralatan pelatihan kerja sangat ditentukan tingkat objektivitas dalam proses seleksi LPKS penerima bantuan. LPKS yang memiliki kualitas baik dengan dibuktikan sertifikasi akreditasi dari lembaga yang berwenang, memiliki peluang yang lebih besar untuk dapat memperdayakan masyarakat memasuki DUDI, melalui proses pelatihan kerja yang berkualitas.

Penambahan jam pelajaran dan anggaran bantuan program pelatihan sangat diperlukan untuk dapat mempersiapkan masyarakat memasuki DUDI

dengan tingkat kompetensi yang memadai, disertai penambahan biaya untuk uji kompetensi oleh LSK.

REFERENSI

Budi Udik Wibowo (2008). Output Lembaga Pendidikan Dalam Perspektif Ekonomi Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*. 2(4) : 1 – 18

Chalimatul Anies Fauziah (2016). Pengaruh Pelatihan Keterampilan Kerja Terhadap Sikap Kemandirian Remaja Putus Sekolah Di UPT Pelayanan Sosial Remaja Terlantar Jombang. *Jurnal J+UNESA* 3(2) : 5(2) : 1-8

Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Dan Produktivitas (2018). Petunjuk Teknis Bantuan Program Pelatihan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS), Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Dan Produktivitas (2018). Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Peralatan Pelatihan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Dwi Agustanico Muryadi (2017). Model Evaluasi Program Dalam Penelitian Evaluasi. *Jurnal Ilmiah PENJAS* 3(1) : 1 – 16

Hidayat Dayat (2016). Dampak Pelatihan Keterampilan Hidup (Life Skills) Montir Otomotif. Terhadap Kesempatan Kerja Dan Pendapatan Warga Belajar *Jurnal Ilmiah VISI PPTK PAUDNI*.11(2): 81-98

Mugiri, Wahyu Lestari (2013). Instrumen Evaluasi Program Dana Bos Model CIPP. *Journal of Educational Research and Evaluation* 2(1) : 7-11

Prayogo Dody (2011). Evaluasi Program Corporate Social Responsibility Dan Community Development Pada Industri Tambang Dan Migas. *Jurnal Makara, Sosial Humaniora* 15(1) : 43-58

Yanama Rindi (2015). Pengaruh Program Pelatihan Menjahit Terhadap Kemandirian Alumni Peserta Didik Di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Citra Ilmu Kabupaten Semarang. Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang.